

PROGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN BAGI WARGA MEKIN

**(Studi Implementasi Program Raskin 2002 di Kecamatan Sawahan dan
Kecamatan Tambaksari Surabaya)**

KK

FIS AN 22 /03

Dan
P

SKRIPSI



Oleh

**LENA DARIWAN
NIM 079013687**

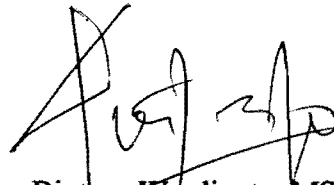
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Semester Gasal 2002/2003**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diajukan

Surabaya, 20 Desember 2002
Mengetahui dosen pembimbing skripsi,



Drs. Bintoro Wardianto, MSi
Nip. 131.801.405

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji didepan Dewan Penguji Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
Surabaya pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 17 Januari 2003
Pukul : 13.00 – selesai
Tempat : Ruang 250

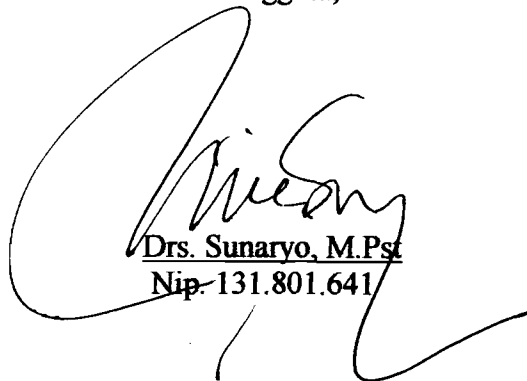
Dewan penguji terdiri dari :

Ketua,



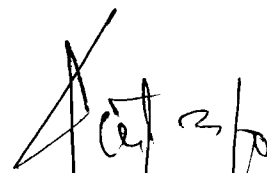
Drs. Gitadi Tegas, Msi
Nip.131.569.363

Anggota,



Drs. Sunaryo, M.Pst
Nip.131.801.641

Anggota,



Drs. Bintoro Wardianto, Msi
Nip. 131. 801.405

ABSTRAKSI

Perwujudan pembangunan nasional memang ditujukan untuk pencapaian suatu kondisi dinamis yang mengarah pada perbaikan serta pemenuhan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dan hal ini perlu juga diiringi dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara wajar sekaligus memberdayakan masyarakat kearah yang lebih optimal.

Namun kondisi yang nampak tidak demikian adanya. Krisis ekonomi melanda negeri ini yang mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok (yaitu beras, ikan, minyak goreng, gula, garam, minyak tanah, telur, sayuran dan susu) dirasakan sangat memberatkan warga masyarakat terutama warga atau keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Kebutuhan pokok pangan utama beras menjadi fokus utama mengingat beras dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di Indonesia sedangkan harga beras dipasaran rata-rata sekitar Rp2.500 sampai dengan Rp 3.000 per kilonya.

Melihat fenomena tersebut maka pemerintah menawarkan suatu konsep yang berupa suatu program subsidi pangan khusus pemenuhan kebutuhan pokok beras dengan memfokuskan kebijakan yang berbasis pada ketersediaan pangan, nutrisi dalam jumlah dan mutu yang cukup pada tingkat harga yang terjangkau (lebih murah dari pada harga di pasaran) guna mengupayakan terbukanya akses pangan khususnya bagi keluarga/warga miskin. Program tersebut dinamakan program RASKIN (beras bagi warga miskin).

Adapun rumusan permasalahan yang diketengahkan disini adalah sejauh mana dan bagaimana implementasi program raskin? dan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap implementasi program raskin tersebut. Dan untuk menjawab permasalahan itu dengan mendasarkan pada beberapa kerangka teori tertentu, metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian eksplanasi maka disajikan data serta analisa data yang terinci yang akhirnya diambil suatu kesimpulan.

Lokasi yang ditetapkan adalah wilayah Surabaya dengan mengambil sampel di wilayah kecamatan Sawahan dan Tambaksari Surabaya dengan pertimbangan wilayah tersebut menjadi wilayah yang mendapat subsidi raskin terbesar. Sedangkan untuk informasi yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dan pendalam pada pihak yang berkompeten yaitu dari BKKBN, Dolog Jatim, Sub Dolog Surabaya Utara, Pemerintah Kota Surabaya, staf kecamatan Sawahan dan Tambaksari Surabaya dengan *key informan* bapak Bayu dari pemerintah kota Surabaya (bagian perekonomian) dan bapak Budi Santoso dari sub dolog Surabaya Utara.

Dari temuan data yang ada, program raskin ini berdasarkan kebijakan subsidi pangan terarah (*targeted food subsidy*) yang merupakan kebijakan *income transfer* yaitu kebijakan yang bersifat lebih pada upaya pembagian/menstransfer bantuan berupa beras yang nantinya akan dibebankan biaya bantuan/subsidi bagi keluarga miskin selaku kelompok sasaran penerima subsidi yaitu Rp 1000 per kilonya dengan intensitas pengiriman per bulan disetiap titik distribusi yang telah ditetapkan.

Dari kebijakan tersebut maka implementasi program raskin 2002 di Surabaya secara rinci telah terlaksana dengan mensubsidi beras mulai bulan Januari sampai

Desember. Dimana pada bulan Januari sampai Maret 2002 telah disubsidikan kepada 87.500 KK dan tonage beras mencapai 869.240 kg. Kemudian bulan April 2002 kepada 73.264 Kk tonage beras mencapai 705.780 kg. Bulan Mei 73.264 KK dengan tonage beras 719.400 kg, bulan Juni 73.300 KK dengan 718.160 kg. Dan bulan Juli sampai Desember 87.500 Kk dengan tonage beras 875.000 kg yang terbagi atas program raskin dan PKS-BBM. Sedangkan untuk wilayah kecamatan terbesar penerima subsidi beras raskin yaitu kecamatan Sawahan Surabaya per bulannya disubsidi sebesar 93.860 kg kepada 9386 KK. Sedangkan kecamatan Tambaksari disubsidi sebesar 88.020 kg kepada 8802 KK.

Implementasi program raskin ini melalui tahapan sesuai dengan data yang ada yaitu tahap persiapan dengan menentukan indikator keluarga miskin yang menjadi kelompok sasaran yang dikategorikan menjadi kelompok pra sejahterah, KS I melalui pencatatan dan pelaporan data oleh BKKBN. Kemudian tahap sosialisasi melalui media cetak dan elektronik. Dan implementasi program dengan mekanisme yang simpel dengan model perpaduan *top down* dan *bottom up* serta melibatkan lembaga tertentu yaitu Pemerintah Kota Surabaya, sub dolog Surabaya Utara, BKKBN serta pihak kecamatan Sawahan dan Tambaksari Surabaya. Sedangkan untuk faktor yang berpengaruh dalam implementasi ini ditetapkan faktor komunikasi, kelompok sasaran dan sikap pelaksana/dukungan lembaga yang didasarkan pada perpaduan pemikiran George Edward, Van Meter, Van Horn dan Grindle.

Dari uraian tersebut dapatlah dianalisa dan diambil suatu kesimpulan bahwa sejauh ini implementasi program raskin 2002 di Surabaya khususnya di kecamatan Sawahan dan Tambaksari masih dinilai belum maksimal dan tingkat keberhasilannya sekitar 70 % sampai 80 % karena masih banyak kekurangan diantaranya pada tingkat sosialisasi intensitasnya kurang karena hanya dilakukan sekali, persiapan data masih jauh dari keadaan dilapangan, keterlibatan lembaga seperti LSM juga kurang karena hanya melibatkan satu LSM saja untuk *monitoring* dan evaluasinya. Selain itu komunikasi antar kelompok sasaran dan pelaksana juga kurang karena hanya dilakukan dalam bentuk rapat-rapat koordinatif saja. Walaupun sikap pelaksana mendukung dan kelompok sasaran menerima program ini dengan baik karena dengan adanya program raskin ini manfaat yang diterima warga miskin adalah pengeluaran sehari-hari untuk kebutuhan beras menjadi 50 % lebih hemat tetapi perlu adanya perbaikan dan modifikasi program agar warga miskin tidak hanya sebagai penerima subsidi pasif tetapi lebih diberdayakan.